



Collaborative Dynamics dalam Penanganan Stunting Melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar

Title: *Collaborative Dynamics in Handling Stunting Through the Ma'silambi Program in Duampanua Village Polewali Mandar Regency*

Rizal Pauzi^{1*}, Nurmadina Jamhur¹, Muh Tang Abdullah¹, Saddam Husain Tamrin²

¹ Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Indonesia.

*Author correspondence: pauzirizal@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-05-13

Revised:

2025-05-19

Accepted:

2025-05-22

Published:

2025-05-23

Keywords: collaboration; collaborative dynamics; stunting management; ma'silambi program; stakeholders;

Kata kunci: kolaborasi; dinamika kolaborasi; penanganan stunting; program ma'silambi; stakeholder;

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

Stunting is a serious public health issue in Indonesia, including in Duampanua Village, Polewali Mandar Regency, which has a high prevalence of stunting. Addressing stunting requires collaboration among various parties, including the government, community, and relevant sectors. This study aims to analyze the collaborative dynamics in addressing stunting through the Ma'silambi Program in Duampanua Village, based on the Collaborative Dynamics theory proposed by Emerson et al. (2012), which includes principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. The approach used in this study is qualitative with a case study research design. Data were collected through interviews with 10 informants consisting of government stakeholders, community members, and other related parties, as well as program documentation analysis. The findings of the study show that although community participation is high, collaboration among stakeholders is still not effective. Several factors hindering the effectiveness of collaboration include unclear role distribution, lack of binding regulations, absence of routine meetings, and inadequate support for all involved parties. As a result, achieving zero stunting in Duampanua Village remains difficult. This study recommends that the village government and the health department clarify the roles of each stakeholder, improve communication and coordination, and establish a binding Village Regulation (PERDES) related to the Ma'silambi program. Future research is expected to examine external factors affecting the success of collaboration, such as socioeconomic factors and government policies.

ABSTRAK

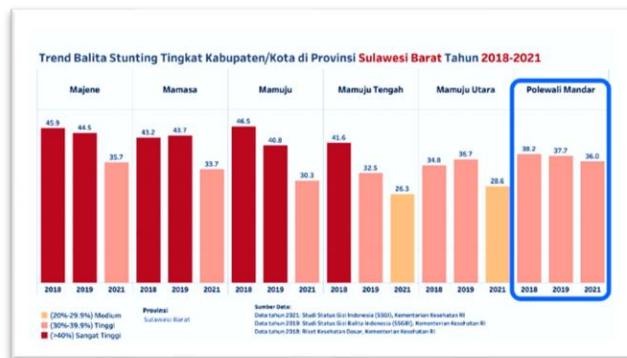
Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Desa Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar, yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanganan stunting melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua, dengan mengacu pada teori Collaborative Dynamics yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2012), yang mencakup principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta analisis dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat tinggi, kolaborasi antar stakeholder masih belum efektif. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas kolaborasi antara lain ketidaktepatan dalam pembagian peran, kurangnya regulasi yang mengikat, tidak adanya pertemuan rutin, serta minimnya pendampingan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan pencapaian zero stunting di Desa Duampanua sulit terwujud. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa dan dinas kesehatan memperjelas peran masing-masing stakeholder, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta menetapkan Peraturan Desa (PERDES) yang mengikat terkait program Ma'silambi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, seperti faktor sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Pendahuluan

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup lama, yang umumnya dikarenakan asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan ini terjadi mulai dari dalam kandungan dan akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun (Kemenenterian Kesehatan, 2018). Permasalahan stunting saat ini menjadi masalah besar secara global berdasarkan data UNICEF dan WHO tahun 2020 angka stunting di Indonesia menempati urutan tertinggi ke 115 dari 151 Negara dan berada di urutan ke-2 di Asia tenggara. Kasus stunting di Indonesia mencapai angka 21,6% walaupun angka tersebut menurun pada tahun sebelumnya yaitu 24,4 % prevelensi stunting di Indonesia masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20% (SSGS, 2022). Berdasarkan hal tersebut permasalahan stunting di Indonesia harus segera ditangani, sehingga program percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas nasional (Pro-PN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mempercepat penanganan stunting khususnya pada wilayah Prioritas stunting. Upaya tersebut mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara Konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas.

Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya. Dari upaya yang dilakukan tersebut, melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor di pusat, daerah, dan desa. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan semua sektor dan partisipasi masyarakat. Provinsi, Sulawesi Barat merupakan Provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua setelah NTT di Indonesia. Hal ini membuat Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi prioritas Percepatan Penurunan Stunting. Berikut persebaran data stunting berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi kedalam 6 Kabupaten yaitu:



Gambar 1. Perevalensi Balita *Stunting* Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten

Sumber: Databoks Kementerian Kesehatan (Kemenenterian Kesehatan, 2018)

Bupati Polewali Mandar mengeluarkan aturan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar. Aturan ini dilatarbelakangi sebagai daerah prioritas *stunting* dan membuat aturan terkait daerah yang menjadi lokus *stunting*. Faktor penyebab tingginya *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingginya angka pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *stunting*. Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan lokus *stunting* di desa sejak tahun 2021. Dari laman kemendagri.go.id tersebut diketahui terdapat beberapa daerah yang menjadi lokus *stunting* termasuk Desa Duampanua Kecamatan Anreapi.

Tabel 1. Angka Pravalensi *Stunting* Kecamatan Anreapi

Data <i>Stunting</i> Kecamatan Anreapi		
Nama Desa	Jumlah <i>Stunting</i>	
	2021	2022
Anreapi	25	40
Kelapa Dua	52	56
Duampanua	67	102
Papandangan	32	23
Kunyi	25	27

Sumber: Dashboard Sebaran *Stunting*, E Monev Bangda 2021-2022

Dari data persebaran stunting di desa Duampanua terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus balita stunting baru semakin meningkat, Mardiati selaku kader desa Duampanua mengatakan terdapat beberapa faktor penghambat adanya stunting yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai stunting, kurangnya ibu membawa balitanya ke posyandu, kurangnya pemeriksaan ibu hamil kefaskes pada awal hamil, hal ini juga dipertegas bahwa jika selama tiga kali berturut-turut balita tidak ke posyandu maka itu sudah masuk rawan stunting karena tidak dapat dikontrol perkembangannya.

Salah satu program yang baru di laksanakan untuk menurunkan stunting di Desa Duampanua yaitu Program Ma'silambi. Program ini merupakan program yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu upaya dalam penanganan stunting, program ini ditetapkan pada 3 wilayah, yakni Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene, Desa Duampanua, di Kabupaten Polewali Mandar, dan Desa Balla Satanean di Kabupaten Mamasa. Tujuan dari adanya program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai program yang ada di desa dalam penurunan stunting. Mereka yang terlibat dalam penanganan stunting melalui program ini merupakan orang yang turut berperan untuk membuat masyarakat lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan di Desa. Hadirnya program ini menjadi salah satu wadah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar menambah pemahaman masyarakat setempat terkait masalah stunting.

Partisipasi dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan. Keberhasilan Program ini akan terwujud jika terdapat partisipasi masyarakat yang baik dalam mengikuti setiap rangkaian program yang dilaksanakan dan menjalankan intervensi sensitive dan spesifik, dengan begitu diharapkan akan mencapai zero stunting di wilayah ini. Berdasarkan penelitian terdahulu terkait partisipasi masyarakat dalam mencapai zero stunting di Kelurahan Bulak Banteng oleh Permatasari & Febriyan (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan stunting di Kelurahan Bulak Banteng dapat dicapai jika masyarakat memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Namun, faktor penghambat seperti rendahnya penghasilan masyarakat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pencegahan stunting, serta tingginya pengaruh budaya dan adat istiadat, dapat mengurangi efektivitas program.

Penelitian terkait dinamika kolaborasi dalam penanganan stunting masih terbatas, terutama di tingkat desa. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada peran sektor kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam menangani stunting, namun sedikit yang meneliti peran kolaborasi antar-sektor dalam konteks desa. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh Mulyadi (2020) yang membahas kolaborasi multisektor dalam penurunan stunting di Kabupaten Soppeng, dan oleh Wijayanti (2021) yang menganalisis program-program kesehatan untuk penurunan stunting di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait sangat menentukan keberhasilan penurunan angka stunting. Meskipun terdapat banyak penelitian

yang mengkaji upaya penurunan stunting, masih belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika kolaborasi dalam program penurunan stunting yang melibatkan berbagai pihak di tingkat desa, terutama dalam konteks program Ma'silambi di Desa Duampanua. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada dinamika kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lain dalam mengatasi permasalahan stunting di Desa Duampanua.

Kajian Literatur

Governance

Governance ini diartikan sebagai pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. *Governance* didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan kekuasaan atau otoritas yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial Tamayao dalam Astuti et al. (2020). Hal tersebut sesuai dengan pendapat World Bank dalam Wasdi (2023) mengatakan kata *governance* lebih menekankan pada cara bagaimana kekuasaan negara/pemerintah digunakan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Djabbari (2023) mengatakan bahwa *good governance* adalah suatu tradisi, lembaga, dan proses dalam penentuan pelaksanaan kekuasaan negara yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta berfokus pada kepentingan publik, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, *governance* hadir menjadi paradigma baru dalam administrasi publik sebagai pola bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik untuk tidak mendominasi karena beban negara yang semakin banyak dan berat dalam mengatasi berbagai masalah yang kompleks sehingga diperlukan keterlibatan swasta dan masyarakat.

Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik yang akan dilakukan (Ansell & Gash, 2008). Model *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap masalah publik yang ada, sehingga dibutuhkan berbagai aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks *governance*. (Astuti et al., 2020). Model Collaborative governance regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson & Nabatchi (2015) menjelaskan bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dan menghasilkan tindakan-

tindakan dan dampak sementara, sebelum menuju kepada dampak utama dan adaptasi terhadap dampak sementara. Komponen yang menjadi proses kolaborasi yakni *collaborative dynamics*, dan impacts and adaptation.

Definisi Stunting

Menurut Kemenkes *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat adanya kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Sedangkan menurut BKKBN *stunting* merupakan kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. (Makripuddin et al., 2021). *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*grow faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan yang biasa disebut dengan periode emas.

Penyebab Stunting dan Proses Terjadinya Stunting

Faktor utama yang menyebabkan *stunting* adalah kurangnya nutrisi, sehingga dapat dikatakan bahwa tubuh yang pendek adalah ciri-ciri dari anak kekurangan gizi. Banyak orang awam yang memahami bahwa faktor genetik menjadi penyebab anak *stunting*, padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan Toliu et al. (2018) menganalisis bahwa faktor genetik tidak terlalu memengaruhi *stunting* pada anak, namun hanya sedikit sekali memengaruhi terjadinya *stunting*. Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara tinggi badan ayah dengan kejadian *stunting* dan hanya sedikit berpengaruh pada tinggi badan ibu, faktor lingkungan yang lebih berpengaruh termasuk pola asuh dan konsumsi makanan pada anak. Siklus *Stunting* adalah siklus pertumbuhan pada manusia sepanjang hayat yang dimulai sejak anak itu lahir kemudian masuk usia remaja, usia subur, hamil, menyusui, dan lansia. Ada tingkatan *stunting* pada anak mulai dari rendah sampai tinggi mulai dari yang pendek sampai sangat pendek yang diukur dari status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, yang hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) ≤ 2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan ≤ 3 SD (sangat pendek/*severely stunted*). Penyebab *stunting* tidak memiliki tingkatan tapi dipengaruhi oleh 4 masalah gizi yang menjadi penyebab adanya *stunting* yakni *weight faltering*, *underweight*, gizi kurang dan gizi buruk. Setelah ke empat masalah tersebut teratasi maka penurunan prevalensi *stunting* akan terjadi.

Percepatan Penurunan Stunting

Dalam rangka mewujudkan Sumber daya manusia yang unggul, masalah *stunting* menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM yang ada khususnya di Indonesia. Hal ini di tandai dengan adanya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu program prioritas Presiden Nomor 72 tahun 2021. Aturan ini sebagai alternative dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia yang tingginya. Disamping itu, wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan *stunting*, hal ini ditandai dengan prevalensi *stunting* yang masih tinggi di wilayah ini. Sehingga membuat penanganan

stunting di Sulawesi Barat merancang berbagai aspek melalui kerjasama dalam pelaksanaan program sebagai alternative dalam percepatan penurunan *stunting*, terutama pada daerah yang memiliki angka *stunting* yang tinggi.

Kebijakan Penanganan Stunting di Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang mandat dan kewenangan desa berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan yang diberikan oleh kepala desa, merupakan mandat untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan. Rujukan belanja desa dalam penanganan *stunting* diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Adapun aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.

Program Ma'Silambi

Program Ma'silambi merupakan salah satu program yang dilakukan dalam percepatan penanganan *stunting*, program ini dilakukan sebagaimana intruksi Presiden dalam percepatan penurunan *stunting* sehingga Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah yang prioritas dengan angka *stunting* tertinggi merancang program ini sebagai salah satu alternative untuk menurunkan angka *stunting* di beberapa Kabupaten. Ma'silambi adalah singkatan dari "Merdeka Ancaman *Stunting* Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi". Menurut Asran, dalam Bahasa Mamasa Ma'silambi berarti bertemu. Sehingga dapat dimaknai sebagai pertemuan beberapa pihak dalam menuntaskan *stunting* baru dengan semangat kolaboratif (Admindinkes, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berfokus pada penerapan teori Collaborative Dynamics dalam penanganan *stunting* melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar. Teori ini mengemukakan bahwa keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan komponen yang saling berhubungan dalam kolaborasi yang efektif. Penelitian ini melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari Kabid. Kesmas, Ahli Gizi, Ketua Forum, Tokoh Agama, Kader Kesehatan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan 3 Masyarakat sasaran program. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Creswell & Poth (2024), yang mencakup pengolahan data, membaca data secara menyeluruh, coding data, serta

mendesripsikan tema-tema yang muncul dalam laporan kualitatif. Dalam analisisnya, peneliti mengidentifikasi pola dan dinamika kolaborasi yang terjadi di antara aktor-aktor terkait, serta dampaknya terhadap penurunan angka stunting. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta berfokus pada pengolahan dan penyajian temuan dalam bentuk narasi yang mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Collaborative dynamics Stakeholder dalam Penanganan Stunting melalui Program Ma'silambi

Dinamika kolaborasi menjadi hal penting dalam proses kolaborasi. Dinamika kolaborasi dilakukan untuk memastikan sejauh mana proses kolaborasi dalam penanganan *stunting* melalui Program Ma'silambi oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Hal ini untuk melihat realita yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan standar yang seharusnya. Dari hasil dinamika kolaborasi tersebut, juga menjadi dasar evaluasi dalam hal perbaikan kolaborasi kedepannya untuk pencegahan *stunting* baru. Program ma'silambi merupakan salah satu program kolaborasi yang dilakukan di Desa Duampanua sebagai inovasi dalam menangani adanya *stunting* baru. Desa Duampanua merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Anreapi yang memiliki *Stunting* yang tinggi. Mereka yang terlibat dalam penanganan *stunting* dalam program ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan sosial, pendampingan, dan edukasi tentang bahaya *stunting*. Sehingga peran semua aktor untuk bekerjasama dalam mengedukasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, hal tersebut akan sulit dilaksanakan dan dicapai ketika proses kolaborasi yang ada kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Sebagai wujud dari peningkatan penanganan *stunting* dari masing-masing aktor yang terlibat. Maka, untuk melihat pelaksanaan kolaborasi tersebut dapat didasarkan pada konsep proses kolaborasi dari dinamika kolaborasi yang dikemukakan oleh (Emerson et al., 2012) meliputi tiga komponen yakni prinsip keterlibatan (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Prinsip Keterlibatan (Principled Engagement)

1) Prinsip dan Penegasan tujuan Bersama

Dari prinsip bersama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat sudah memiliki prinsip bersama dengan adanya kepedulian untuk memberikan masyarakat agar tetap berpartisipasi pada program yang ada. Hal ini sesuai dengan adanya informasi yang disampaikan oleh salah satu kader kesehatan mengatakan;

"...kolaborasi dilakukan antar instansi mulai dari beberapa aktor yang terlibat termasuk saya sebagai kader posyandu sangat dibantu dalam bekerjasama menghadirkan balita untuk keposyandu, sehingga masyarakat ini akan berpartisipasi aktif dengan dilakukannya penjemputan untuk mereka yang memiliki akses yang jauh dari posyandu".

Hal tersebut juga sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang memiliki balita *stunting* mengatakan;

"...diberikannya bantuan kepada kami dari beberapa program yang ada termasuk hari posyandu ini sangat membantu apalagi kami juga ini biasa di jemput oleh petugas jadi, saya melihat pemerintah sudah menganggap masalah stunting ini sebagai prioritas. Tapi hanya ketika program ini baru dibentuk, kalau sekarang saya lihat sudah agak mulai berkurang karena yang saya lihat hanya itu yang selalu hadir dan hanya lebih fokus di posyandu saja".

Prinsip bersama yang dimiliki dengan adanya kepedulian oleh setiap *stakeholder* ternyata hanya dimiliki oleh beberapa aktor saja hal ini dikarenakan kerjasama masih lebih fokus hanya pada program penimbangan di Posyandu dan adanya beberapa aktor yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program.

2) Aktor yang terlibat

Aktor yang terlibat pada forum Ma'silambi mulai dari Pemerintah Kabupaten yakni pihak kesehatan hingga pemerintah desa dan masyarakat desa. Keterlibatan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector*, terkait aktor yang terlibat lebih banyak melibatkan *stakeholder* dari masyarakat, hal ini dilakukan agar penanganan yang dilakukan lebih mudah disampaikan ke masyarakat. Dari adanya keterlibatan tersebut sudah memiliki peran masing-masing namun keterlibatan pihak Puskesmas tidak ada dalam SK yang dikeluarkan. Sehingga hasil Penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat masih kurang mempresentasikan masyarakat hal ini juga dikarenakan peran yang dimiliki belum spesifik ke masing-masing aktor yang ditandai dengan masih adanya beberapa *stakeholder* yang belum mengetahui peran yang dimilikinya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan Afn selaku Ketua Forum terkait peran dari keterlibatan masing-masing aktor mengatakan;

"...peran aktor semua sama yaitu melakukan sosialisasi saja. Tapi, kalau tugas masing-masing tidak jelas mekanismenya seperti apa, karena mereka itu tugasnya yang dipahami agar stunting ini diketahui oleh masyarakat luas melalui sosialisasi".

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan tersebut didasarkan dengan adanya Surat Keputusan dari Camat Anreapi Nomor: KPTS.09/KEC/ANR/2022 tentang Pembentukan Forum Ma'silambi dalam Rangka Kolaborasi Penanganan *Stunting* Baru yang mana dalam surat keputusan tersebut terdapat keterlibatan dan peran yang dimiliki.

3) Face to face dialogue

Terkait pertemuan yang dilakukan mengatakan bahwa, forum ini berbasis insidental karena pertemuan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu, sebagaimana yang disampaikan oleh kader kesehatan yang terlibat dalam forum mengatakan;

"...tidak ada pertemuan rutin, pertemuan biasa tiba-tiba dan baru terlaksana dua kali. Cuman ini ada grub yang dibuat dan didalam mereka memberikakn arahan untuk menyampaikan setiap kegiatan yang sudah dilakukan".

Berdasarkan wawancara bersama kader kesehatan diketahui bahwa, pertemuan hanya dua kali terlaksana selama pembentukan program dan pembahasan yang diberikan dalam pertemuan telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan progres kolaborasi yang dilakukan. Namun, masih kurang karena tidak adanya pertemuan rutin dan komitmen bersama yang membuat pelaksanaan program kurang terpantau.

Motivasi Bersama (Shared Motivation)

1) Kekuatan Individu untuk Terlibat

Adanya informasi yang diperoleh dari ketua forum Ma'silambi bahwa kekuatan yang digunakan untuk terlibat dalam forum merupakan tanggung jawab yang diberikan dari Dinas Provinsi sebagai pembuat program dan memiliki program penunjang dalam penanganan *stunting* di Desa. Adanya anggaran yang ada di desa yang dialokasikan dalam penanganan *stunting* menjadi kelebihan desa agar dapat keluar dari lokus *stunting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan keterlibatan yang dimiliki oleh masing-masing aktor karena adanya kemauan, tanggung jawab dan kepedulian yang dimiliki untuk mencapai *zero stunting*. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu aktor yang terlibat mengatakan;

"...saya dipanggil dari pemerintah desa sekaligus sebagai utusan juga dari posyandu, saya menerima untuk terlibat karena ingin desa ini keluar dari permasalahan stunting".

2) Kepercayaan Bersama

Ketua forum Ma'silambi sudah berupaya membangun kepercayaan kepada aktor dengan menyampaikan secara langsung untuk tetap aktif dan membantu dalam menangani masalah *stunting*. Namun, kepercayaan yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* masih kurang dikarenakan kurangnya komunikasi masing-masing aktor dalam bekerjasama. Pendapat tersebut selaras yang disampaikan oleh Mst selaku tokoh perempuan terkait kepercayaan yang dimiliki mengatakan;

"...saya sebagai tokoh perempuan belum pernah di berikan arahan yang jelas karena pertemuan rutin juga yang tidak jelas begitupun dengan aktor yang lain saya jarang berkomunikasi".

Kurangnya monitoring yang dilakukan membuat kepercayaan masyarakat dan beberapa aktor berkurang hal ini disebabkan tidak adanya interaksi diluar kolaborasi, tidak adanya saling ketergantungan dalam menjalankan tugas walaupun beberapa sudah memiliki pengalaman sesuai fungsi yang dimiliki. Sehingga hal ini menyebabkan kepercayaan masing-masing *stakeholder* yang terlibat masih rendah karena kurangnya komunikasi secara intens dan komitmen masing-masing aktor dalam berkolaborasi. Hal ini juga di dukung dari adanya beberapa masyarakat yang masih kurang menjalankan intervensi sensitive dan spesifik hal ini dibuktikan dari adanya informasi yang diperoleh dari informan Mdn sebagai Ahli Gizi mengatakan;

"...banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankan intervensi sensitive dan spesifik di desa ini seperti adanya paparan asap rokok pada balita dan ada juga yang tidak menjaga pola makan balitanya dengan baik".

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait masalah *stunting* hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat:

"...sebenarnya kami sudah percaya adanya program Ma'silambi sebagai penanganan Stunting bisa mengatasi masalah kekurangan gizi pada balita. tapi ada masyarakat juga yang masih merasa kurang percaya mengenai stunting karena tidak ada penjelasan yang benar anak stunting itu seperti apa, karena banyak anak yang pendek ini tapi pintar dan itu tetap di data sebagai anak stunting".

3) Pemahaman Bersama

Pemahaman Bersama yang dimiliki *stakeholder* dalam forum Ma'silambi dijelaskan oleh informan Afn selaku ketua forum Ma'silambi mengatakan;

"...sebenarnya beberapa yang terlibat di dalam forum itu mereka sudah paham karena sudah ada pembekalan dilakukan sebelumnya. Tapi ini kegiatannya baru terlasana satu kali".

Adanya pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah sudah memberikan pemahaman bersama masing-masing aktor dalam menangani masalah *stunting*, tapi masih terdapat beberapa aktor yang tidak mengetahui dan kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam pembekalan tersebut tidak memberikan arahan secara jelas kepada masing-masing aktor terkait cara penanganannya sesuai fungsinya. Pemahaman aktor masih kurang karena pendampingan yang dilakukan hanya sekali dan tidak ada penjelasan terkait masing-masing sesuai peran yang dimiliki. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Sbh sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam forum terkait penjelasan pemerintah dalam menangani *stunting* mengatakan;

"...sebenarnya sudah ada cuman tidak jelas disampaikan. Mereka hanya menyuruh kami untuk sampaikan masalah penyebab stunting kepada masyarakat. Tidak ada pemahaman bersama anak Stunting itu seperti apa, yang kami tau itu Stunting itu tinggi badan tidak sesuai usianya. Kami susah memberikan pemahaman kepada masyarakat karena kami juga sebenarnya masih kurang paham karena peran dan pemahaman kami tidak sampai situ".

4) Legitimasi

Legitimasi yang digunakan dalam forum Ma'silambi berdasarkan dari adanya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* tetapi tidak ada penguat legitimasi khusus untuk Program Ma'silambi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua forum Ma'silambi Afn mengatakan;

"kalau untuk aturan kami mengikut dari pemerintah terkait pelaksanaannya. Karena di desa sebenarnya belum ada regulasi khusus untuk tangani Stunting, tapi dana desa menjadi penguat karena sudah ada aturan penggunaannya untuk desa sehat. Kalau khusus Program Ma'silambi yang ada cuman SK dari camat".

Adanya surat keputusan dari Camat Anreapi Nomor: kpts. 09/Kec/Anr/2022 tentang pembentukan forum Ma'silambi hanya sebagai pendukung dari adanya kolaborasi di Desa Duampanua.

5) Semangat Kolaborasi

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan terkait semua aktor yang terlibat, memiliki semangat dengan adanya kepedulian dari beberapa aktor, hal ini disebabkan karena mereka memiliki keinginan agar desa Duampanua dapat keluar dari lokus *stunting*. Seperti yang disampaikan oleh ketua forum

"...beberapa yang terlibat memiliki semangat karena bagaimanapun kita ini malu, selalu menjadi desa yang memiliki angka stunting tertinggi, jadi tujuannya kami berkolaborasi ini agar desa ini bisa keluar dari lokus stunting".

Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh Pemuda:

"...kami semangat untuk terlibat karena kebanyakan kami masih peduli dengan desa, walaupun tidak ada insentif yang diberikan yang ada hanya pemberian rompi kepada semua yang terlibat".

Walapaun keterlibatan dari *stakeholder* ini tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, beberapa aktor yang masih terlibat tetap menjalankan tugasnya walupun hanya sebatas sosialisasi. Hal ini juga sesuai dengan teori Motivasi Harzberg pada faktor Hygiene mengatakan bahwa, gaji atau upah dalam kepuasan kerja tidak berpengaruh besar dalam pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan. Hal ini memang terbukti dengan keterlibatan mereka hanya secara sukarela dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sehingga, adanya kepedulian ini membuat semangat kolaborasi aktor untuk terlibat.

Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama (Capacity For Joint Action)

1) Fungsi Aktor

Fungsi Aktor dari wawancara dengan ketua forum Ma'silambi mengatakan:

"...kalau dari segi fungsi yang dimiliki jelas semua aktor itu diberikan sesuai dengan perannya, tapi terkadang mereka yang terlibat ini kesulitan memahami fungsi yang sudah diberikan, ini juga di upayakan agar pemerintah dinas kesehatan dapat memberikan pengarah dan pendampingan lebih jelas".

Fungsi aktor sudah diberikan sesuai peran yang ada dalam masyarakat desa sesuai hasil kesepakatan forum, mereka yang dipilih ini disesuaikan dengan perannya dimasyarakat sebagai perwakilan untuk dilibatkan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kader kesehatan, tokoh pemuda dan lainnya. Namun, dari hasil wawancara pada *stakeholder* yang terlibat peran dari tupoksi masing-masing aktor tidak sesuai dengan yang mereka pahami dan yang terdapat di SK, tugas di SK untuk anggota semuanya sama, *stakeholder* yang berkolaborasi hanya memahami fungsinya sebatas melakukan sosialisasi dan membantu meramaikan dalam setiap program yang ada di desa untuk melibatkan masyarakat lebih aktif. sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu aktor yang terlibat mengatakan;

"...saya ini terlibat di forum sebagai tokoh perempuan tapi saya juga sebagai ibu kader. Jadi, saya masih bingung peran saya apa sebagai tokoh perempuan, makanya saya lebih aktif di posyandu. Tugas saya sebagai ibu kader itu tetap sosialisasi juga tapi khusus kepada ibu balita". Hal tersebut terjadi karena kurangnya pendampingan

dan arahan yang diberikan oleh pemerintah terkait peran sesuai fungsinya yang dimiliki.

2) Tindakan Efektif

Pelibatan aktor pada program Ma'silambi dalam mempercepat penanganan stunting dikatakan efektif ketika terdapat penurunan *stunting* dan peningkatan partisipasi masyarakat lebih tinggi. Adapaun partisipasi masyarakat hanya lebih intens dilakukan di posyandu. Wawancara yang dilakukan kepada ketua forum Afn terkait dampak sementara dalam pelaksanaan program mengatakan;

"...aktor yang terlibat bisa sedikit berpengaruh karena sejak ada penanganan dari Program Ma'silambi sudah lumayan banyak partisipasi masyarakat dalam mengikuti penimbangan balita, dan disini bisa dikontrol balita yang stunting. Tapi kalau dampak itu harus jangka panjang jadi sulit untuk dicapai".

Hal ini ditandai dengan adanya tingkat partisipasi mencapai hingga 99% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Balita Ke Posyandu Desa Duampanua

Tahun	Partisipasi Masyarakat
2021	61, %
2022	73,5 %
2023	99%

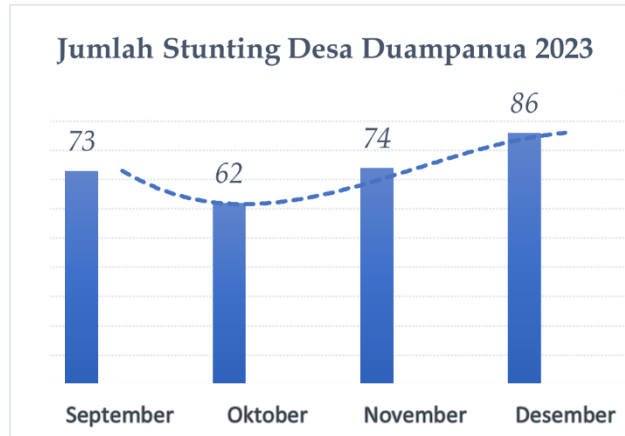
Sumber: Hasil olah data penelitian, 2024

Dari data presentasi partisipasi masyarakat yang hadir ke posyandu, diukur dari jumlah pemetaan data balita keseluruhan di setiap posyandu yang ada di Desa Duampanua. Adanya jumlah balita yang ada secara keseluruhan dinilai sudah mampu berpartisipasi lebih aktif dari presentasi yang di peroleh sebesar 99% yang sering hadir pada setiap kegiatan posyandu untuk melakukan penimbangan dan pendampingan balita.

Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dari penimbangan di psoyandu melalui tindakan kolaborasi sudah efektif karena telah mencapai 99% penimbangan. Namun, secara keseluruhan dinilai masih kurang efektif dari tindakan kolaborasi yang dilakukan karena hanya fokus pada satu program saja yang menyebabkan belum adanya penurunan *stunting*. Kenyataannya adanya partisipasi tersebut tidak berpengaruh besar dalam penurunan *stunting*. Hal ini disebabkan adanya *stunting* baru ini berpengaruh dari adanya pernikahan dini, faktor lingkungan, pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. *Stakeholder* yang terlibat dalam Program Ma'silambi ini belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka kurang menjalankan intervensi dalam pencegahan *stunting*. Hal ini dibuktikan dengan informasi yang didapat dari masyarakat penerima program SIm mengatakan;

"...kami susah menjalankan pola hidup sehat, karena prekoniman kami juga terbatas apalagi ditambah anak saya yang biasa terpapar asap rokok". Dan kalau kami tegur tidak enak juga dengan bapaknya".

Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menjaga pola hidup sehat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait cara penanganan dan menjaga kebersihan, hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh ahli gizi bahwa salah satu penyebab *stunting* itu dari adanya asap rokok yang dihirup oleh balita. Hal ini ditandai dengan adanya data *stunting* berikut.



Gambar 2. Jumlah Balita *Stunting* Desa Duampanua

Sumber: Puskesmas Anreapi 2023 (di olah peneliti)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari beberapa bulan dibentuknya dan dijalankannya Program Ma'silambi ditahun 2023 tidak memberikan dampak penurunan *stunting* secara signifikan walaupun partisipasi masyarakat di Posyandu sudah meningkat dari setiap tahun. Kenyataannya adanya partisipasi tersebut tidak berpengaruh besar dalam penurunan *stunting*. Hal ini disebabkan adanya *stunting* baru ini berpengaruh dari adanya faktor lingkungan, pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. *Stakeholder* yang terlibat dalam Program Ma'silambi ini belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka kurang menjalankan intervensi dalam pencegahan *stunting*.

3) Kapasitas

Kapasitas *Stakeholder* yang terlibat didapatkan ketika masing-masing aktor memiliki pengetahuan dan paham dengan tugas dan peran dalam menangani masalah *stunting* sesuai tupoksi yang diberikan. Dari informasi yang diperoleh kapasitas yang dimiliki masyarakat terutama yang terlibat sudah paham akan masalah *stunting* karena sudah dibekali dengan adanya program sebelumnya yang ada di Desa. Aktor yang terlibat dalam berkolaborasi dalam forum terkait tupoksi yang diberikan sudah jelas dalam SK tapi tidak spesifik kepada masing-masing aktor. Hal ini membuat aktor tidak menjalankan peran sesuai tupoksi yang diberikan karena tidak sesuai dengan fungsinya. Tupoksi tersebut hanya dilakukan oleh beberapa yang

terlibat. Seperti yang disampaikan oleh ketua forum selaku tim pengarah mengatakan;

“...ada yang paham cuman ada beberapa yang kurang paham karena malas, hal ini dikarenakan belum ada pembekalan dan pelatihan kepada aktor yang terlibat dalam menangani masalah Stunting”.

Beberapa aktor yang terlibat ini belum memiliki kapasitas dikarenakan kurangnya pendampingan dan pendidikan aktor yang masih rendah.

Kesimpulan

Dinamika kolaborasi dalam penanganan stunting melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar, belum optimal dalam pelaksanaannya. Meskipun partisipasi masyarakat terhadap program ini tergolong tinggi, indikator-indikator yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2012) terkait *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* masih belum terlaksana secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterlibatan berbagai stakeholder, banyak dari mereka yang belum menunjukkan partisipasi dan komitmen yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pembagian peran antar stakeholder, di mana peran yang dimiliki oleh masing-masing aktor tidak cukup spesifik dan jelas. Selain itu, kurangnya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan program, minimnya kepedulian, serta tidak adanya pertemuan rutin dan pendampingan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, menjadi faktor penghambat yang berkontribusi pada meningkatnya angka stunting, sehingga pencapaian zero stunting di desa ini masih sulit diwujudkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokus dengan melakukan kajian terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam penanganan stunting, seperti faktor sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, dan peran sektor swasta dalam mendukung upaya penurunan stunting.

Referensi

- Achadi, E. L. (2020). *Pencegahan Stunting: Pentingnya peran 1000 pertama* Kehidupan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annur, C. M. (2023). Daftar prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2022, provinsi teratas. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-provinsi>
- Astuti, dkk. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. (T.D. Press, Ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *BKKBN mencari strategi percepatan pencegahan stunting*. BKKBN.
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research*, 21(3), 221-236. <https://doi.org/1.1177/0739456X0202100301>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. United States: SAGE Publications Ltd.
- Dinas Kesehatan. (2022). Sekda Provinsi Sulbar launching Forum Ma'silambi. Retrieved from <https://dinkes.sulbarprov.go.id/sekda-provinsi-sulbar-launching-forum-masilambi/>
- Dinas Kesehatan. (2023). Kadinkes Provinsi Sulawesi Barat bagikan cerita praktik baik Ma'silambi dalam upaya penanggulangan stunting. Dinas Kesehatan. Mamuju: Sulbar.bkkbn.go.id. Retrieved from <https://dinkes.sulbarprov.go.id/kadinkes-prvinsi-sulawesi-barat>
- Dinas Kesehatan Sulbar. (2023). Ma'silambi. Dinkes Sulbar dorong Desa Duampanua 100 persen balita ditimbang di Posyandu. 2enam.com Polman. Retrieved from <https://2enam.com/masilambi-dinkes-sulbar-dorong-desa-duampanua-100-persen-balita-ditimbang>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & O'Leary, R. (2015). *Collaborative governance regimes*. United States of America.
- Effendi. (2019). *Asas manajemen*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hamdan, H. (2022). Angka stunting di Sulbar 33,8% tertinggi kedua di Indonesia. *Detik Sulsel*. Retrieved from <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6310555/angka-stunting-di-sulbar-33-8-tertinggi-kedua-di-indonesia>
- Hadina, dkk. (2022). Upaya pencegahan dan penanganan stunting. *FHJ*, 9(2), 176-840.
- Hanapi, M. F. (2022). Program Ma'silambi untuk turunkan stunting di Sulbar. *COPYRIGHT@ANTARA*. Retrieved from <https://mantaranews.com/berita/3111865>.
- Kemendes RI. (2018). *Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenko PMK. (2023). Kemenko PMK bergerak bersama 19 K/L di Sulawesi Barat dalam upaya percepatan penurunan stunting. *Kesehatan, Kemenko PMK, Sulawesi Barat*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-bergerak-bersama-19-kl-di-sulawesi-barat-dalam-upaya-percepatan-penurunan-stunting>
- Kementerian Kesehatan. (2018). Mengenal stunting dan gizi buruk: Penyebab, gejala, dan mencegah. *Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Kurniasih, N. (2023). Collaborative governance dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Temanggung. *Public Administration and Local Governance*, 7(1). Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/7438/0>
- Miliati, N. A. (2021). *Cegah stunting sebelum genting: Peran remaja dalam pencegahan stunting*. (A. Dharmawan, Ed.). Jakarta: PT Gramedia.
- Mitra. (2015). Stunting problem and interventions to prevent stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6). Retrieved November 21, 2023, from <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol2.Iss6.85>

- Muhammad. (2022, January 31). Prevalensi stunting Sulbar. Retrieved October 2, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/r6sct380/prevalensi-stunting-balita-sulbar-tertinggi-di-polman>
- Permatasari, E., & Eprilianto. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam mencapai zero stunting di Kelurahan Bula Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 11(4), 2637-2650.
- Pallawalino. (2023). Tentang Ma'silambi, program Dinkes Sulbar dalam menangani stunting pada balita. *SULBAR KINI*. Retrieved from <https://kumparan.com/sulbarkini/tentang-masilambi-prgram-dinkes-sulbar>
- Putra, I. (2023, September 13). Dana desa bisa dioptimalkan untuk turunkan stunting di Polewali Mandar. Retrieved October 19, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/s199ln484/dana-desa-bisa-dioptimalkan-untuk-turunkan-stunting-di-polewali-mandar>
- Rizki, A. (2021). Pengertian stunting: Penyebab, gejala, dampak, dan cara mencegahnya. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stunting/>
- Salubarana. (2023). Tangani masalah empat plus satu, Dinkes Sulbar gelar Ma'silambi. *Mamuju: Radio Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.rri.go.id/daerah/318162/>
- Sudarmo. (2015). *Menuju model resolusi konflik berbasis governance: Memuat pengalaman penelitian lapangan tentang isu pedagang kaki lima dan konflik antar kelompok*. Sebelas Maret University Press.
- Sumarwanto. (2022). Gerakan kolaborasi percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan tim pendamping keluarga di Kecamatan Bonang. Retrieved October 19, 2023, from <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id/2022/02/geralan-kolaborasi-percepatan-penurunan-stunting-melalui-pemberdayaan-tim-pendamping-keluarga-di-kecamatan-bonang/>
- Thomas, J. C., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66(1), 20-32.
- Udiani, N. (2016). Kolaborasi perencanaan (studi kasus pengembangan UMKM di Kabupaten Maros). *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin*.
- Ven, A. H. Van de, & Walker, P. (1948). The dynamics of interorganizational coordination. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 29(4).
- Vigoda-Gadot, E. (2002). *Public administration: An interdisciplinary critical analysis (Public administration & public policy)* (E. Vigoda-Gadot, Ed.). Routledge.
- Zulkifis, M. (2021). *Penanggulangan angka stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang*. Skripsi.